

BAB II

NATION BUILDING DAN INTEGRASI SOSIAL

Pengaruh penetrasi kolonial barat telah menghasilkan negara-negara baru yang membawa masalah baru dalam tatanan politik. Negara-bangsa merupakan konsep yang kemudian direkomendasi sebagai obat mujarab untuk masalah masalah tatanan politik dan perbaikan ekonomi. Hal ini mengakibatkan orang-orang dipaksa untuk membentuk entitas budaya dari budaya-budaya etnis yang berlainan, dan hal ini disebut sebagai bangsa (Thompson, 2017).

A. *Nation Building*

Dalam era dimana konsep nasionalisme menjadi tren, banyak negara telah berupaya untuk membentuk identitas masyarakatnya untuk menciptakan atau meningkatkan loyalitas mereka pada konsep negara-bangsa (*nation-state*) yang ada. *Nation-building* adalah bentuk yang biasa digunakan untuk menyebut kebijakan yang digunakan oleh negara dalam mencapai

tujuan pembentukan identitas tersebut. Harris Mylonas, dalam bukunya yang berjudul *Nation-Building* (2012), secara khusus membagi variasi kebijakan negara yang cukup populer diterapkan di negara-bangsa yang ada menjadi tiga jenis secara umum, yaitu Eksklusi, Asimilasi, atau Akomodasi (Kocher, 2016).

Elit negara yang dianggap mewakili “*core-group*” mengarahkan kebijakan yang dianggap sesuai untuk diimplementasikan kepada “*non-core group*” dalam menghasilkan populasi yang loyal. Contoh dari kebijakan Eksklusi adalah pertukaran populasi wajib, pembersihan etnis, dan genosida, yang tujuannya jelas menghapus keberadaan *non-core group* yang dianggap kehadirannya tidak sesuai dengan tujuan elit negara. Sedangkan sekolah wajib, dan wajib militer merupakan contoh dari kebijakan Asimilasi yang bertujuan memotivasi atau memaksa *non-core group* untuk mengadopsi profil identitas *core group*. Baik kebijakan Eksklusi maupun kebijakan Asimilasi sama-sama bertujuan untuk menghapuskan perbedaan. Hasil dari dua jenis kebijakan ini biasanya adalah terjadinya pengungsian massal atau pembunuhan massal. Lain halnya dengan kebijakan Akomodasi

yang lebih bersifat menjaga, bahkan terkadang mengakomodasi atau mempromosikan perbedaan profil antar kelompok. Kebijakan ini secara resmi melindungi anggota *non-core group*, dan menghasilkan kelompok minoritas nasional (Kocher, 2016).

Nation Building merupakan proses menyusun identitas nasional menggunakan kekuatan negara (Deutsch & Foltz, 2010; Mylonas, 2017). *Nation Building* bertujuan untuk menyatukan masyarakat di dalam negara sehingga tetap stabil secara politik. Bagian dari otoritas pemerintah dalam rangka proses *nation building* adalah wajib militer dan sekolah nasional (Darden & Grzymala-Busse, 2006; Darden & Mylonas, 2016; Posen, 1995). *Nation building* dapat melibatkan penggunaan propaganda atau pembangunan infrastruktur utama untuk mendorong kerukunan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Tiga faktor penentu keberhasilan *nation building* dalam jangka panjang: perkembangan awal organisasi masyarakat sipil, kebangkitan negara yang mampu menyediakan kebutuhan publik secara merata di seluruh wilayah, dan munculnya media komunikasi bersama (Wimmer, 2018).

Stein Rokkan melihat *nation state* terdiri dari 4 aspek. Di Eropa Barat, aspek aspek ini biasanya saling mengikuti dalam urutan yang kurang lebih sama, sehingga dapat juga dianggap sebagai fase *nation building*. Fase pertama menghasilkan penyatuan ekonomi dan budaya di tingkat elit. Fase kedua membawa sektor yang lebih besar dari massa ke dalam sistem melalui wajib militer, sekolah wajib, dan lain lain. Media massa yang berkembang yang berkembang menciptakan jalan untuk kontak langsung antara elit pusat dengan populasi pinggiran dan menghasilkan perasaan memiliki identitas yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Pada fase ketiga, massa rakyat terlibat aktif dalam sistem politik teritorial. Pada tahap akhir, aparat administrasi berkembang. Layanan kesejahteraan publik dibentuk dan kebijakan nasional untuk pemerataan kondisi ekonomi dirancang (Rokkan, 1975).

Namun menurut Connor, *nation building* dalam tradisi Deutschan berarti asimilasi ke dalam masyarakat yang lebih besar dan terhapusnya identitas khas etnis, yang ternyata justru lebih banyak menghasilkan *nation destroying* dibanding *nation*

building. Asimilasi lengkap etnis minoritas sebagian besar telah gagal di seluruh dunia (Connor, 2018). Selain itu Connor juga mempertanyakan istilah "bangsa" pada kata *nation building*, dimana suatu bangsa hampir selalu berasal dari beragam sumber etnis.

Beberapa negara telah membuktikan bahwa tidak mudah melaksanakan kebijakan *nation building*, bahkan terkadang hasilnya belum seperti yang diharapkan. Malaysia Barat, seperti halnya negara negara baru lainnya, menghadapi tugas berat untuk menciptakan sebuah negara dari berbagai kelompok etnis dengan perbedaan bahasa, agama, sejarah, budaya, dan persepsi yang saling bertentangan. Menggunakan kebijakan dalam bidang pendidikan, yang dipandang sebagai instrumen utama untuk membangun bangsa Malaysia, dengan tujuan utama adalah menggantikan loyalitas kelompok primordial (Melayu, China, India) dengan identitas nasional yang menyeluruh yaitu Bahasa Melayu atau Bahasa Malaysia (Hon-Chan, 2017).

Rusia di masa kepemimpinan Putin menerapkan kebijakan minoritas yang bertujuan untuk pelestarian keanekaragaman

budaya dan bahasa di Rusia. Namun statisme dan promosi patriotisme kepemimpinan Putin yang luar biasa justru mengarahkan pada pengurangan keragaman di Rusia. Hukum dan kebijakan Rusia, serta standar internasional mengenai hak-hak minoritas justru lebih terkesan tersentralisasi dan menuju keseragaman. Kebijakan minoritas terpecah-pecah dan lemah dan semakin buruk dengan kondisi defisit demokrasi dibawah kepemimpinan Putin. Dalam manajemen keanekaragaman, jaringan informal lebih banyak digunakan. Hal ini kemudian justru menghilangkan warisan budaya Rusia yang kaya dan merusak koeksistensi yang membentuk masyarakat Rusia (Prina, 2015).

Perdebatan politik dan kebijakan kontemporer di Perancis berpusat pada diskusi tentang apakah Islam, atau gelombang baru imigran Muslim, menimbulkan ancaman bagi persatuan nasional dan identitas Perancis. Identitas agama dianggap sebagai faktor yang dapat memecah belah, dan sebagai sumber identitas kelompok dan mobilisasi yang berpotensi terjadi penantangan terhadap mayoritas atau kelompok arus utama (Mattei & Aguilar, 2016).

Amerika Serikat menekankan kebijakan akomodasi yang telah berkontribusi di sekolah sekolah umum di Amerika Serikat untuk menghindari eskalasi konflik agama dan budaya (Mattei & Aguilar, 2016). Pemindahan dan upaya penggabungan Indian Amerika dan imigran Eropa dan juga negara negara di benua Amerika lainnya, juga sebagian kecil dari Timur juga dinilai berhasil (Gordon, 2015).

Menurut Derya Bayir, kegagalan Turki dalam mengakomodasi keragaman etnis-agama disebabkan oleh filosofi pendiri nasionalisme Turki dan penetrasi yang kuat ke dalam sosio-politik dan hukum negara. Sistem hukum yang ada telah berlaku tidak adil pada konsep perlindungan minoritas sesuai yang diberikan oleh hukum internasional, yang merujuk pada etnis Turki dan Islam Sunni sebagai mayoritas (Bayir, 2016).

Di Singapura, sebelum tahun 1960, berbagai kelompok etnis imigran terkonsentrasi membentuk kantong kantong di berbagai bagian Singapura. Sejak 1960, pemerintah Singapura menggunakan perumahan umum sebagai instrumen kebijakan untuk mengintegrasikan populasi multi-etnis secara spasial.

Kebijakan perumahan publik telah berhasil mengurangi intensitas kantong etnis sekaligus meningkatkan integrasi sosial (Sim, Yu, & Han, 2003).

B. Integrasi Sosial

Integrasi sosial merupakan sebuah proses menyelaraskan anggota *non-core group* (minoritas/migran) ke dalam struktur masyarakat mayoritas/tuan rumah. Integrasi sosial, integrasi ekonomi, serta integrasi identitas menjadi tiga dimensi utama untuk menyelaraskan kelompok minoritas ke dalam kelompok mayoritas (Alba; Nee, 1997). Integrasi Sosial yang baik adalah bagaimana menyatukan berbagai kelompok etnis terlepas dari bahasa, kasta, keyakinan, dan sebagainya, tanpa kehilangan identitas khas seseorang. Hal ini akan menghilangkan segregasi.

Dalam pandangan yang lebih luas, Integrasi sosial tidak hanya berarti asimilasi paksa, namun difokuskan pada kebutuhan untuk menciptakan masyarakat yang aman, stabil, dan adil dengan memperbaiki kondisi yang berpotensi menyebabkan disintegrasi

sosial, eksklusif sosial, fragmentasi sosial, dengan memperluas koeksistensi secara damai, kolaborasi, dan juga kohesi (UN, 2015).

Konsep yang paling banyak ditawarkan oleh ilmuwan sosial dalam menjelaskan mengenai integrasi sosial adalah konsep Asimilasi. Menurut Park dan Burgess asimilasi merupakan suatu proses interpenetrasi dan fusi dimana sekelompok orang menerima ingatan, sentimen, dan sikap dari kelompok lain dan kemudian saling berbagi pengalaman dan sejarah, dan menggabungkannya dalam kehidupan budaya bersama (Park; Burgess, 1969). Asimilasi dianggap sebagai konsep yang paling tepat untuk menggambarkan proses integrasi dikarenakan imigran akan berasimilasi ke dalam masyarakat penerima secara ekonomi, sosial, dan budaya dari generasi ke generasi (Alba; Nee, 1997).

Selain konsep asimilasi, teori mengenai multikulturalisme juga berkembang dalam penggambaran proses integrasi sosial. Imigran / pendatang / kelompok minoritas tidak selalu harus membaur dengan kelompok penerima hingga kehilangan identitas asli mereka. Imigran / pendatang / kelompok minoritas sejatinya masih dapat mempertahankan identitas khas mereka melalui

proses integrasi dalam rangka membentuk masyarakat penerima dengan warisan budaya yang makin beragam (Glazer & Moynihan, 1970).

Selain itu, beberapa ilmuwan juga menawarkan teori / konsep asimilasi tersegmentasi (*segmented assimilation*) untuk memahami proses dimana generasi kedua, yaitu anak-anak imigran kontemporer, masuk ke dalam sistem stratifikasi dalam kelompok masyarakat penerima. Teori ini ingin menggambarkan apa yang terjadi pada anak-anak imigran (Zhou, 1997). Terdapat tiga kemungkinan pola adaptasi yang memungkinkan bagi imigran dan keturunannya. Yang pertama, mampu secara perlahan terintegrasi paralel ke dalam kelompok kelas menengah masyarakat penerima. Yang kedua, justru turun menuju kelompok kelas bawah dengan kemiskinan permanen. Yang ketiga, kelompok yang dapat mengasosiasikan kemajuan ekonomi yang cepat dengan tetap mempertahankan nilai-nilai komunitas imigran yang khas (Portes & Zhou, 1993). Ketiga pola inilah yang diacu oleh para ilmuwan untuk mengenalkan konsep asimilasi tersegmentasi. Diharapkan, kelompok dengan latar belakang kurang mampu pada akhirnya

meninggalkan cara hidup mereka yang lama, dan sepenuhnya "melebur" ke dalam arus utama melalui integrasi dalam urutan generasi kedua atau berikutnya (Zhou, 1997).

Inti dari perspektif konsep asimilasi adalah asumsi bahwa ada proses alami berbagai kelompok etnis datang dan berbagi budaya dan mengusahakan peluang untuk mendapatkan akses yang sama. Proses ini secara bertahap meninggalkan pola budaya dan perilaku lama demi yang baru, dan ketika mulai bergerak maka proses ini akan terus bergerak tak terhindarkan dan tidak dapat diubah lagi. Asimilasi klasik berpendapat bahwa ada kemungkinan terjadinya tarik menarik budaya antara budaya asal dan budaya yang ingin mereka masuki (Park, 1928; Stonequist, 1937).

Menurut Vigdor (2009), beberapa indikator yang paling sering digunakan untuk mengetahui seberapa berhasil masyarakat minoritas / imigran berintegrasi dengan masyarakat penerima adalah:

1. Jaringan Sosial; dilihat seberapa banyak teman teman anggota kelompok minoritas yang berasal dari luar kelompoknya.
2. Bahasa; dilihat dari kemampuan anggota kelompok minoritas dalam menguasai bahasa lokal.
3. Perkawinan; dilihat seberapa tinggi penerimaan atau keinginan anggota kelompok minoritas untuk menikah dengan penduduk lokal

Menurut Warner dan Srole, asimilasi etnis minoritas berpotensi bermasalah karena subordinari kelompok minoritas sebagian besar masih didasarkan kepada karakteristik asal. Dalam beberapa generasi, memang memungkinkan bagi kelompok minoritas untuk menghilangkan perbedaan dalam status sosial dan ekonomi berdasar budaya dan bahasa, namun mobilitas sosial antar mereka justru akan membuat mereka terkurung dalam batas batas kasta ras. Maka dalam hal ini, identifikasi warna kulit, bahasa asal, dan agama menjadi faktor kunci dalam menentukan tingkat penerimaan minoritas oleh kelompok dominan (Warner & Srole, 1945).

Gordon mengungkapkan tipologi asimilasi dalam tulisannya. Asimilasi dijalani dengan proses yang kompleks mulai dari asimilasi budaya (akulturasi), struktural, melalui perkawinan, hingga asimilasi sipil (Gordon, 1964). Asimilasi budaya atau akulturasi tidak kemudian mengarahkan pada bentuk bentuk asimilasi yang lain, artinya kelompok kelompok etis pada akhirnya masih dapat dibedakan. Bila akulturasi merupakan tahap pertama dalam proses asimilasi, maka menurut Gordon (1964) asimilasi struktural merupakan kunci untuk mengarah pada tahap asimilasi lainnya. Asimilasi struktural, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah pemberian kesempatan kepada golongan minoritas untuk menjadi warga lembaga sosial primer dari golongan mayoritas. Hal ini dilakukan dengan penggabungan kelompok minoritas ke dalam struktur sosial kelompok mayoritas, hingga akhirnya kelompok dominan tidak lagi menganggap mereka sebagai 'orang lain'. Para imigran yang minoritas harus membebaskan diri dari budaya lama mereka untuk mulai bangkit dari posisi marjinal.

Integrasi Sosial dapat dipahami dengan berbeda. Sebagian menganggap integrasi sosial sebagai peluang untuk memperoleh persamaan hak bagi setiap individu. Namun bagi sebagian yang lain, peningkatan integrasi memiliki konotasi negatif, memaksakan keseragaman yang tidak diinginkan. Dan bagi sebagian lain lagi, istilah tersebut tidak menggambarkan keadaan positif dan negatif, namun sekedar penggambaran dari pola hubungan antar manusia (UNIRSD, 1994).

Ketika integrasi sosial dipahami sebagaimana diatas, muncul beberapa masalah yang menyertai. Beberapa diantaranya adalah

- a) Anggapan bahwa kemiskinan dan ketidakadilan dapat diatasi dengan menggabungkan orang-orang yang sebelumnya termarginalkan ke dalam kelompok utama, tidak kemudian serta merta menampilkan ekonomi dan ekologis yang mapan dan berkelanjutan.
- b) Bila kebutuhan keanekaragaman budaya tidak cukup mendapat perhatian, maka sangat mungkin terjadi penyeragaman yang dipaksakan.

- c) Kelompok minoritas yang diintegrasikan ke dalam kelompok arus utama sering dianggap tidak memiliki apa apa. Padahal bahkan kelompok paling miskin ataupun kelompok yang tidak terorganisir pun memiliki bentuk organisasi sosial mereka sendiri. Mengabaikan hal itu, berpotensi menghasilkan kebijakan yang buruk.
- d) Keberhasilan mencapai masyarakat yang lebih adil dan merata biasanya diawali dengan adanya disintegrasi sosial.

Dalam pertemuan Internasional yang diselenggarakan oleh UNIRSD tahun 1994 bertajuk *Social Integration: Approaches and Issues* dikemukakan bahwa pola dan proses integrasi sosial memiliki pola masing masing di setiap era. Era modern yang dimuali sejak 1990-an banyak dipengaruhi oleh tatanan global yang mulai berubah dengan adanya globalisasi. Batas batas pertukaran ekonomi dan kontak budaya yang berkembang dengan cepat, di satu sisi telah meningkatkan peluang hidup bagi sebagian kelompok, namun di sisi lain juga berpotensi menghancurkan peluang bagi kelompok lain. Ketika pekerja kasar, petani, dan yang setara dengan itu harus bersaing dengan pebisnis besar, hal itu

dapat memperparah ketidaksetaraan, marginalitas, dan kesenjangan budaya. Adanya gangguan pada solidaritas lokal dan memuncaknya perasaan marginalitas akan mendorong konflik etnis dan agama.

Pola perkawinan antara imigran dan penduduk asli di Amerika Serikat dapat menjadi contoh. Kira-kira satu dari enam perkawinan di Amerika Serikat melibatkan imigran. Latar belakang etnis-ras membentuk lintasan integrasi sosial imigran. Imigran kulit putih jauh lebih memungkinkan untuk menikahi penduduk asli kelahiran Amerika Serikat dibanding kelompok lain, seperti imigran kulit hitam dan Asia (China). Perkawinan campuran kemudian juga dapat dikaitkan dengan indikator integrasi sosial lainnya seperti pencapaian pendidikan, lamanya waktu tinggal dan status naturalisasi. Hal ini dapat menyembunyikan keragaman substansial dalam proses asimilasi perkawinan (Syed & McLean, 2016).